

## **Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Industri Kecil Oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Sekadau**

**Yulita Oktavia <sup>1)</sup>; Netty Herawati <sup>2)</sup>; Lina Sunyata <sup>3)</sup>**

**<sup>1,2,3)</sup> Master's Program in Publik Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University, Pontianak**

**Email: <sup>1)</sup>[Yulitaok28@gmail.com](mailto:Yulitaok28@gmail.com)**

### **ARTICLE HISTORY**

*Received [10 Oktober 2025]  
Revised [28 Januari 2026]  
Accepted [30 Januari 2026]*

### **KEYWORDS**

*Evaluation, Coaching for Small and Medium Enterprises, CIPP Method.*

**This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license**



### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan pembinaan industri kecil yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan (DKUKMP) Kabupaten Sekadau dalam meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku usaha kecil. Data yang diperoleh melalui wawancara dengan aparat Pembina / ASN di DKUKMP Kabupaten Sekadau dan pelaku usaha industri kecil yang pernah mengikuti kegiatan pembinaan dianalisis dengan Metode CIPP (Context, Input, Process dan Product) untuk menganalisis apakah kegiatan pembinaan sesuai kebutuhan pelaku usaha, bagaimana sumber daya yang tersedia dalam kegiatan pembinaan, Seperti apa pelaksanaan kegiatan pembinaan dan apa hasil dan dampak dari kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten sekadau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pembinaan ini sangat dibutuhkan oleh pelaku industri kecil. Rekomendasi yang disarankan meliputi Peningkatan Ketersediaan data dan pengembangan basis data pelaku usaha industri kecil, penambahan jumlah dan Fasilitas aparatur pembina industri serta Penguatan anggaran pelatihan, peningkatan kolaborasi dengan instansi dan lembaga lain , DKUKMP juga disarankan untuk menerapkan sistem pembinaan berkelanjutan pasca pelatihan agar program dapat mencapai hasil yang lebih optimal dalam jangka panjang.

### **ABSTRACT**

*The purpose of this study is to evaluate how well the Sekadau Regency Office of Cooperatives, Small and Medium Enterprises, and Trade (OCSMET) has implemented coaching for small industries to improve the competitiveness and capabilities of small business owners. To find out if the coaching activities meet the needs of business owners, how resources for coaching are available, how the coaching is carried out, and what outcomes and impacts result from the coaching activities by the Office of Cooperatives, SMEs, and Trade of Sekadau Regency, data was gathered through interviews with government officer/Civil Servant officials at OCSMET Sekadau Regency and small industry entrepreneurs who took part in the coaching. This data was analyzed using the CIPP Method (Context, Input, Process, and Product). The findings showed that small industry participants need this coaching program. To achieve better results in the long run, it is recommended that OCSMET enhance collaboration with other agencies and institutions, strengthen the training budget, increase the number and facilities of industrial development staff, and create a database of small industry business owners. Additionally, OCSMET should establish a sustainable coaching system after training.*

## **PENDAHULUAN**

Sektor industri kecil memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian, baik di tingkat nasional maupun daerah. Peran ini tampak nyata melalui kemampuannya menyerap tenaga kerja, memperkuat perekonomian lokal, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya di wilayah masing-masing. Di Indonesia, pelaku industri kecil tersebar di hampir seluruh daerah dan menjadi bagian penting dalam struktur ekonomi kerakyatan. Karena itu, keberlanjutan dan pertumbuhan sektor ini sangat dipengaruhi oleh dukungan pemerintah, baik pusat maupun daerah, khususnya melalui kebijakan dan program pembinaan yang dirancang secara tepat dan berkelanjutan.

Kabupaten Sekadau, sebagai daerah yang tengah berkembang di Provinsi Kalimantan Barat, dengan kekayaan sumber daya alam dan manusia yang cukup potensial untuk mendukung pengembangan sektor industri kecil. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sekadau 2021–2026, ditegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada usaha mikro, kecil, koperasi, dan industri. Komitmen tersebut diimplementasikan oleh Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan melalui program pembinaan yang meliputi pelatihan teknis dan manajerial, fasilitasi perizinan usaha, serta integrasi pelaku industri kecil dengan platform digital seperti Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dan pelatihan e-commerce.

Jumlah pelaku industri kecil di Kabupaten Sekadau terus meningkat, dari 1.017 unit pada tahun 2021 menjadi 1.369 unit pada 2023. Kenaikan ini menunjukkan perkembangan positif sektor industri kecil di daerah. Namun, hanya sekitar 240 pelaku yang mengikuti program pembinaan selama periode

tersebut. Ketidakseimbangan ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana program pembinaan telah menjangkau sasaran dan memberi manfaat nyata. Karena itu, evaluasi diperlukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi di lapangan.

## LANDASAN TEORI

Model evaluasi CIPP dirancang untuk memberikan informasi yang berguna bagi pengambil keputusan dalam rangka perbaikan program secara berkelanjutan. Pendekatan ini memberikan umpan balik yang komprehensif terhadap konteks, masukan, proses, dan hasil program sehingga dapat digunakan sebagai dasar peningkatan efektivitas pelaksanaan program (Stufflebeam, 2003). Menurut Suryadin et al(2021) (2002:39), model CIPP bertujuan memberikan umpan balik yang menyeluruh bagi pengambil kebijakan dan pelaksana program dalam rangka pengambilan keputusan yang berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Evaluasi dengan pendekatan CIPP memberikan gambaran menyeluruh terhadap efektivitas suatu program melalui empat komponen utama, yaitu: konteks, masukan, proses dan produk/hasil.

Penggunaan model CIPP dalam konteks ini bertujuan untuk mengungkap dinamika pelaksanaan pembinaan industri kecil secara lebih utuh, sekaligus memberikan umpan balik (feedback) yang berguna bagi perbaikan program di masa depan. Evaluasi dengan pendekatan ini dianggap relevan untuk program-program pembangunan di tingkat daerah yang kompleks, melibatkan banyak aktor, memiliki keterbatasan sumber daya, serta tantangan geografis seperti yang dihadapi oleh Kabupaten Sekadau

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang diarahkan untuk memahami secara mendalam bagaimana proses pembinaan industri kecil dijalankan oleh Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Sekadau. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggambarkan realitas di lapangan secara alami, tanpa intervensi, serta menelusuri dinamika yang terjadi selama pelaksanaan program. Melalui metode ini, peneliti berupaya menelaah keterkaitan antara tujuan program, kesiapan sumber daya, pelaksanaan kegiatan, dan hasil yang dicapai, sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai efektivitas program pembinaan industri kecil di daerah tersebut

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Sekadau, yang berperan sebagai instansi pelaksana program pembinaan industri kecil. Kegiatan penelitian berlangsung selama tujuh bulan, dimulai pada November 2024 hingga Mei 2025, mencakup tahapan penyusunan proposal, observasi lapangan, wawancara, pengumpulan data, serta analisis dan penulisan laporan akhir.

Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan partisipan yang dianggap paling memahami konteks dan relevan dengan fokus penelitian. Informan utama terdiri atas Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Sekadau, Sekretaris Dinas, staf teknis yang menangani pembinaan industri kecil, serta pelaku usaha kecil yang pernah mengikuti kegiatan pembinaan. Pemilihan informan ini dimaksudkan agar data yang diperoleh berasal dari pihak-pihak yang memiliki pengalaman langsung terhadap pelaksanaan program pembinaan.

Data penelitian mencakup data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, observasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan, serta dokumentasi lapangan. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui kajian terhadap berbagai dokumen pendukung, seperti peraturan daerah, peraturan bupati, laporan kegiatan, dan publikasi institusi yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara utama. Pertama, observasi langsung di lokasi pelaksanaan program untuk mengamati kegiatan pembinaan, penggunaan fasilitas, dan interaksi antara pelaku usaha dan petugas pembina. Kedua, wawancara terstruktur dan tak terstruktur untuk menggali persepsi, pengalaman, serta evaluasi informan terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan. Ketiga, dokumentasi berupa pengumpulan foto kegiatan, arsip laporan, data statistik, dan dokumen regulasi yang mendukung analisis terhadap program pembinaan.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara yang dikembangkan berdasarkan empat komponen Model Evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product). Pedoman ini berfungsi sebagai panduan dalam menggali data secara sistematis selama proses wawancara. Instrumen didukung oleh alat bantu seperti alat tulis, perangkat perekam (smartphone), dan catatan lapangan.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahapan utama: reduksi data, yaitu memilah dan menyaring data yang relevan dengan

fokus penelitian; penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif dan visualisasi pendukung; serta penarikan kesimpulan dan verifikasi melalui proses iteratif dan reflektif berdasarkan pola temuan di lapangan.

Untuk menjamin validitas hasil penelitian, digunakan teknik triangulasi teknik, yaitu menggabungkan berbagai metode pengumpulan data (observasi, wawancara, dan dokumentasi) untuk sumber data yang sama. Dengan membandingkan dan memverifikasi data dari berbagai sumber dan teknik, penelitian ini memastikan bahwa hasil yang diperoleh bersifat konsisten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Program pembinaan industri kecil yang dijalankan memiliki peranan strategis dalam memperkuat perekonomian daerah melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha kecil. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang menegaskan kewajiban pemerintah menciptakan iklim usaha yang mendukung dan berkelanjutan bagi pelaku industri kecil. Pelaksanaan pembinaan difokuskan pada tiga bidang utama, yaitu perencanaan dan pengembangan industri, pengelolaan perizinan usaha industri, serta penguatan sistem informasi industri. Ketiga bidang tersebut saling terintegrasi untuk meningkatkan kemampuan teknis, manajerial, dan legalitas usaha pelaku industri kecil, sekaligus memperluas akses terhadap informasi industri nasional.

Evaluasi program dilakukan dengan menggunakan model CIPP (Context, Input, Process, Product) guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan dan hasil dari kegiatan pembinaan tersebut :

#### 1. Aspek *Context* (Konteks)

Pelaku industri kecil di Kabupaten Sekadau menunjukkan kebutuhan tinggi terhadap pembinaan yang berfokus pada pelatihan teknis, akses permodalan, dan pemasaran. Sebagian besar peserta menyatakan pelatihan yang diberikan telah membantu memperoleh izin usaha, mengakses pembiayaan, serta meningkatkan kemampuan produksi. Namun, kendala seperti keterbatasan modal, kualitas produk yang belum konsisten, dan rendahnya literasi digital masih menghambat kemajuan usaha. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pembinaan yang lebih berkelanjutan dan adaptif terhadap dinamika pasar.

#### 2. Aspek *Input* (Masukan)

Sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan program masih terbatas. Bidang Perindustrian DKUKMP hanya memiliki tiga orang aparatur pembina untuk melayani lebih dari seribu pelaku industri kecil, sehingga jangkauan pembinaan belum optimal. Keterbatasan dana menyebabkan kegiatan pelatihan hanya dapat dilakukan sekali dalam setahun. Fasilitas operasional seperti kendaraan dinas dan ruang pelatihan juga masih minim, sehingga kegiatan lapangan sering terkendala logistik.

#### 3. Aspek *Process* (Proses)

Pelaksanaan program sudah mengacu pada dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan RENSTRA DKUKMP. Setiap kegiatan dilaksanakan sesuai prosedur tetap (SOP) yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Bentuk kegiatan pembinaan disesuaikan dengan potensi lokal, misalnya pelatihan tenun di Belitang Hulu dan anyaman di Nanga Taman. Partisipasi peserta cukup tinggi, meskipun sebagian mengikuti kegiatan berdasarkan undangan, bukan inisiatif pribadi. Peserta yang aktif menunjukkan peningkatan keterampilan signifikan dibanding peserta pasif.

#### 4. Aspek *Product* (Hasil dan Dampak Program)

Hasil pelaksanaan menunjukkan peningkatan kemampuan teknis dan manajerial pelaku industri kecil. Sebagian besar peserta telah memiliki legalitas usaha (Nomor Induk Berusaha) dan terdaftar dalam SIINAS. Dampak positif lainnya adalah meningkatnya kualitas produk dan kemampuan pemasaran digital. Namun, keberlanjutan hasil masih terbatas akibat minimnya pendampingan pascapelatihan dan terbatasnya akses bahan baku serta pasar.

### Pembahasan

Berdasarkan hasil kajian dengan menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product), pelaksanaan program pembinaan industri kecil di Kabupaten Sekadau dapat diuraikan melalui empat aspek utama sebagai berikut:

#### 1. Aspek Context

Berdasarkan hasil pada aspek konteks, dapat diinterpretasikan bahwa program pembinaan industri kecil telah relevan dengan kebutuhan masyarakat sasaran. Pelatihan dan pendampingan yang diberikan menjawab permasalahan mendasar pelaku usaha, seperti keterbatasan keterampilan dan legalitas. Hal ini sejalan dengan prinsip Stufflebeam (2003) bahwa evaluasi konteks bertujuan mengidentifikasi kebutuhan, masalah, dan peluang agar program dapat dirancang sesuai kondisi nyata. Dengan demikian, DKUKMP telah menjalankan peran perencanaan yang tepat, meskipun analisis kebutuhan masih perlu diperkuat agar program lebih responsif terhadap dinamika pasar.

## 2. Aspek Input

Hasil evaluasi pada aspek input menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana kerja menjadi tantangan utama. Kesiapan input yang belum optimal memengaruhi kelancaran proses pelaksanaan. Temuan ini memperkuat pandangan Edward III (dalam Subarsono, 2022) bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparatur pembina, peningkatan alokasi anggaran, dan kerja sama lintas lembaga perlu diprioritaskan agar input program lebih memadai.

## 3. Aspek Process

Berdasarkan hasil pada aspek proses, pelaksanaan program telah mengikuti mekanisme formal dan melibatkan berbagai pihak, namun masih minim dalam hal evaluasi pasca kegiatan. Tidak adanya sistem monitoring yang terstruktur menyebabkan hasil pelatihan sulit diukur keberlanjutannya. Padahal, Stufflebeam & Shinkfield (1985) menegaskan bahwa evaluasi proses berperan penting sebagai umpan balik bagi penyempurnaan implementasi. Oleh karena itu, DKUKMP perlu mengembangkan sistem pemantauan berkelanjutan untuk memastikan pelaku industri kecil benar-benar menerapkan hasil pembinaan.

## 4. Aspek Product

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pembinaan memberikan dampak positif terhadap peningkatan keterampilan dan legalitas pelaku industri kecil, namun efek jangka panjangnya belum maksimal. Hal ini mengindikasikan bahwa outcome program masih bersifat jangka pendek. Temuan ini sejalan dengan pandangan Suryadin et al. (2021) bahwa efektivitas program pembinaan tidak hanya diukur dari hasil langsung, tetapi juga dari keberlanjutan dampak yang dihasilkan. Oleh sebab itu, diperlukan strategi pendampingan lanjutan dan penguatan jaringan kemitraan agar hasil program dapat terus berkembang.

Keempat aspek evaluasi dalam model CIPP menunjukkan hubungan yang saling memengaruhi. Aspek konteks yang relevan perlu diimbangi dengan input yang memadai agar proses dapat berjalan efektif dan menghasilkan produk yang optimal. Dalam kasus pembinaan industri kecil di Kabupaten Sekadau, keberhasilan program sebagian besar ditentukan oleh kesiapan sumber daya dan efektivitas mekanisme proses. Dengan demikian, penguatan input (SDM, anggaran, dan infrastruktur) serta perbaikan sistem monitoring menjadi kunci utama dalam meningkatkan hasil program.

Secara keseluruhan, implementasi program ini sudah berada pada jalur yang tepat dalam memberdayakan pelaku industri kecil. Namun untuk mewujudkan dampak jangka panjang, pemerintah daerah perlu menekankan aspek keberlanjutan program, sinergi antarinstitusi, dan penguatan evaluasi berbasis data agar hasil pembinaan dapat berkontribusi secara nyata terhadap peningkatan daya saing industri kecil di Kabupaten Sekadau.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan Model Evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) terhadap pelaksanaan program pembinaan industri kecil, dapat disimpulkan bahwa program ini telah berjalan dengan arah yang progresif, meskipun masih menghadapi sejumlah keterbatasan yang perlu mendapatkan perhatian dalam pengembangan selanjutnya. Dari aspek konteks (context), program pembinaan yang dilaksanakan merupakan respons yang relevan terhadap permasalahan nyata yang dihadapi pelaku industri kecil, seperti keterbatasan modal, kapasitas produksi, serta akses pasar.

Program ini juga selaras dengan arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sekadau, sekaligus mendukung penguatan ekonomi lokal secara berkelanjutan. Dari aspek masukan (input), pelaksanaan program masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan infrastruktur pendukung. Jumlah aparatur pembina yang belum sebanding dengan jumlah pelaku industri kecil menyebabkan pembinaan belum dapat menjangkau

seluruh sasaran secara optimal. Keterbatasan ini berdampak pada efektivitas pelaksanaan program, baik dari sisi intensitas pendampingan maupun kualitas hasil pelatihan.

Pada aspek proses (process), program telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme perencanaan daerah dan mengadopsi metode pelatihan serta pendampingan yang relevan dengan potensi lokal. Meskipun demikian, keberhasilan pelaksanaan program masih sangat bergantung pada dukungan kebijakan, konsistensi pendanaan, dan kolaborasi lintas sektor. Tingkat partisipasi peserta menunjukkan hasil yang beragam, di mana sebagian pelaku usaha mampu menunjukkan perkembangan positif, sedangkan sebagian lainnya masih pasif dan membutuhkan bimbingan lanjutan. Sementara itu, pada aspek hasil (product), program pembinaan telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan legalitas usaha, kapasitas produksi, dan daya saing pelaku industri kecil. Hasil tersebut menandakan adanya kemajuan dalam pemberdayaan pelaku industri kecil di Kabupaten Sekadau. Namun demikian, dampak jangka panjang program masih perlu diperkuat melalui pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan, peningkatan intensitas pendampingan pasca pelatihan, serta integrasi program ke dalam ekosistem pembinaan yang lebih inklusif dan terarah.

## **Saran**

Berdasarkan temuan evaluatif dan simpulan di atas, disusun beberapa saran sebagai berikut:

- a. Penguatan Basis Data dan Pemutakhiran Informasi Pelaku IKM.  
Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Sekadau perlu mengembangkan sistem data yang akurat dan terintegrasi mengenai profil, jenis usaha, kapasitas produksi, dan kebutuhan pelaku IKM. Validasi dan digitalisasi data akan mempermudah perencanaan program, penetapan sasaran intervensi, serta evaluasi dampak kebijakan secara berkelanjutan.
- b. Penambahan SDM dan Peningkatan Alokasi Anggaran.  
Dinas disarankan untuk menambah jumlah tenaga pembina industri serta meningkatkan kompetensi teknis melalui pelatihan internal. Bersamaan dengan itu, perlu penguatan alokasi anggaran pembinaan, khususnya untuk program pelatihan, fasilitasi perizinan, dan pendampingan usaha. Langkah ini penting untuk memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan kualitas interaksi antara pembina dan pelaku usaha.
- c. Penguatan Kemitraan Lintas Sektor dan Kelembagaan  
Untuk mengatasi keterbatasan internal, diperlukan kemitraan strategis dengan perguruan tinggi, lembaga pelatihan, pelaku swasta, lembaga keuangan, dan dinas teknis lainnya. Sinergi ini akan memperkaya konten pelatihan, membuka akses ke teknologi dan pembiayaan, serta memperluas jejaring pasar pelaku industri kecil. Pendekatan multipihak akan memperkuat posisi IKM dalam ekosistem ekonomi lokal yang lebih kompetitif.
- d. Penerapan Sistem Pendampingan Berkelanjutan  
Dinas disarankan untuk mengembangkan sistem pendampingan pasca pelatihan, baik dalam jangka menengah maupun panjang. Model ini mencakup kunjungan lapangan berkala, bimbingan manajerial, serta fasilitasi lanjutan terhadap akses pasar dan legalitas. Sistem pendampingan ini bertujuan untuk memastikan transfer pengetahuan dan keterampilan benar-benar diinternalisasi dan berdampak pada performa usaha.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Wahab, S. (2001). Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Agustino, L. (2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Arman, S. (2017). Metode Penelitian Kualitatif: Petunjuk Penelitian dan Penulisan Laporan. Yogyakarta: Kepel Press.
- Arikunto, S. (2008). Evaluasi Program Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara
- Denhardt, R.B & Denhardt, J.V. (2003). The New Publik Service : Serving, Not Steering. New York : M.E, Sharpe.
- Djam'an, S., & Komariah, A. (2010). Metodologi Penelitian. Bandung : ALfabeta
- Dunn, N. W. (1998). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Jakarta: Gajah Mada University Press.
- Hartini, S. (2021). Evaluasi Program Pelatihan Kewirausahaan di Kota Bandung
- Kusumanegara, S. (2010). Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gava Media.
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mubyarto. (2000). Ekonomi Kerakyatan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi. Yogyakarta : BPF.
- Nugroho, R. D. (2004). Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: Gramedia.
- Nugroho, R. (2020). Kemitraan Strategis dalam Pengembangan UMKM. Jakarta: Kencana
- Pasolong, H. (2008). Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.

- Soejono Soekamto & Prawirokusumo, S. (2001). *Dasar-dasar Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Liberty.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryadin, et.al (2021). *Evaluasi Program Model CIPP (Context, Input, Process, and Product): Antara Teori dan Praktiknya*. Yogyakarta: Deepublish.
- Thoha, M. (2019). *Analisis Pembinaan Organisasi*. Depok: RajawaliPress.
- Subarsono, AG (2022). *Analisis Kebijakan Publik : Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Winarno, B. (2008). *Kebijakan Publik Teori & Proses*. Jakarta: Media Pressindo.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri*.
- Pemerintah Kabupaten Sekadau. (2019). *Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sekadau Tahun 2019–2039*.